

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Desa

Desa kuripan pada awal berdirinya tahun dipimpin oleh Pemerintahan Bapak Marhusin Bulat selaku Kepala Suku. Beliau adalah salah seorang yang berjuang mendirikan desa Kuripan agar diakui secara resmi dalam pemerintahan dan juga beliau seorang pejuang Kemerdekaan/Veteran yang sekarang masih hidup. Pada awal masa pemerintahan beliau Desa Kuripan masih berbentuk satu desa dengan desa Rimbun Tulang sekarang ini. Nama Desa tersebut adalah Desa Kuripan dan sekaligus berkedudukan sebagai ibukota Kecamatan Kuripan. Tahun ke tahun berlalu masa bakti Bapak Marhusin Bulat berakhir dan jabatan selaku Kepala Desa digantikan oleh Bapak Misri Durja. Akan tetapi dikarenakan beliau berhalangan dalam melaksanakan tugas, maka sebelum masa bakti berakhir, beliau mengajukan pengunduran diri sebagai kepala desa. Selanjutnya dilakukan pemilihan ulang dan terpilih Bapak Surya Atmaja, beliau adalah anak dari Bapak Marhusin Bulat.

Setelah beberapa tahun beliau menjabat lalu Desa Kuripan mengalami pemekaran menjadi dua Desa yaitu Desa Kuripan dan Desa Rimbun Tulang. Letak geografis Desa Rimbun Tulang berada disebelah Utara Desa Kuripan dengan tanda perbatasan antara Desa Kuripan dan Rimbun Tulang yaitu disebelah Utara SDN Kuripan Sekarang. Sehubungan dengan pemekaran desa tersebut, maka letak perkantoran Kecamatan Kuripan sekarang berada di Desa Rimbun

Tulang sehingga ibukota kecamatan Kuripan sekarang berkedudukan di desa Rimbun Tulang. Namun untuk nama Ibu Kota Kecamatan Kuripan secara administratif tetap berkedudukan di Desa Kuripan.

Setelah masa bakti Bapak Surya Atmaja berakhir, maka jabatan selaku Kepala Desa digantikan oleh Bapak Johan Arifin yang merupakan kakak kandung dari Bapak Surya Atmaja dan juga anak kandung dari Bapak Marhusin Bulat. Bapak Johan Arifin berakhir masa baktinya pada tahun 2001.

Pada tanggal 6 September 2001 dilantik Kepala Desa terpilih yaitu bapak Hadiat anak kandung dari bapak Asmuni pada masa jabatan 2001 s/d 2006, setelah pada tanggal 6 September tahun 2006 masa bakti Bakti Hadiat selaku Kepala Desa Kuripan berakhir, pada saat itu tidak bisa dilakukan pemilihan Kepala Desa berhubung Peraturan pemerintah belum dikeluarkan yang mengatur tentang pemilihan Kepala Desa. Sementara menunggu Peraturan Pemerintah tersebut diberlakukan maka yang menjabat selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Kuripan sesuai Hasil Rapat BPD yang diketuai oleh Bapak Suciani, maka terpilih Bapak Bardiansyah yang kebetulan Beliau saat itu menjabat selaku Kepala Urusan Pembangunan Desa Kuripan.

Selanjutnya pada bulan April tahun 2007 segera dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, maka terpilih kembali bapak Hadiat menjadi Kepala Desa Kuripan untuk masa bakti tahun 2007 – 2014.

Setelah masa bakti bapak Hadiat berakhir dilakukan pemilihan kepala desa yang baru dan terpilih bapak Surya Atmaja sebagai kepala desa yang baru dengan masa bakti periode 2015 – 2021. Demikian sejarah singkat tentang Desa Kuripan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Geografis Desa

Desa Kuripan merupakan salah satu desa di Kecamatan Kuripan berada di bagian Utara dari Ibukota Kabupaten Barito Kuala. Terletak pada $2^{\circ}24'30''$ - $2^{\circ}24'30''$ LS Lintang Selatan dan $111^{\circ}56'0''$ - $112^{\circ}0'0''$ BT Bujur Timur dengan batas batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Rimbun Tulang
- 2) Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Tapin
- 3) Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Jarenang
- 4) Sebelah Barat, berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah

Luas wilayah wilayah Desa Kuripan adalah 16 km² yang terdiri dari 12 RT, dan 0 RW Desa Kuripan berada pada ketinggian 0,2 – 3 meter dpl yang kemampuan dan kesuburan tanahnya dipengaruhi oleh pasang surut air dan sebagian tergenang dan didominasi oleh rawa. Secara keseluruhan wilayah Desa Kuripan merupakan daerah dataran rendah yang relatif datar.

Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain, yang terdiri dari

Tabel 4. 1 Luas dan Pemanfaatan Tanah

No	Tata Guna Tanah	Luas (Ha)
1	Tanah Pemukiman	117
2	Tanah sawah	2.780
3	Pekarangan	-
4	Perkebunan	-
5	Hutan	8.760
6	Jalan, Sungai, Kuburan dll	643

Sumber : *Profil Desa*

1) Demografi Desa

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, berjumlah 687 jiwa. Adapun rincian penduduk berdasarkan jenis secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Desa Kuripan

NO	Tahun	Jumlah Penduduk	laki-laki	%	Perempuan	%
1	2021	656	298	41	358	52

Sumber: Profil Desa

Berdasarkan data tahun 2021, penduduk terbanyak adalah di kelompok umur 25-29 tahun yang mencapai 76 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah penduduk dengan usia lanjut yakni penduduk kelompok usia 60 keatas yang mencapai 23 jiwa. Keadaan penduduk berdasarkan struktur usia Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Desa Kuripan

Jumlah Penduduk Desa Kuripan
Dari Tingkat Usia tahun 2021 (dalam jiwa)

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Usia 0 - 4 Thn	15	19	34
2	Usia 5 - 9 Thn	24	27	51
3	Usia 10 - 14 Thn	20	22	42
4	Usia 15 - 19 Thn	23	28	51
5	Usia 20 - 24 Thn	21	34	55
6	Usia 25 - 29 Thn	34	42	76
7	Usia 30 - 34 Thn	23	29	52
8	Usia 35 - 39 Thn	22	24	46
9	Usia 40 - 44 Thn	30	26	56
10	Usia 45 - 49 Thn	27	30	57
11	Usia 50 - 54 Thn	18	31	49

12	Usia 55 - 59 Thn	13	15	28
13	Usia 60 - 64 Thn	11	12	23
14	Usia > 65 Thn	17	19	36
JUMLAH		298	358	656

2) Kondisi Sosial Budaya

Prioritas dalam rangka peningkatan produktivitas suatu wilayah. Kualitas SDM suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan derajat kesehatannya. Tingkat pendidikan Penduduk Desa Kuripan dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori yaitu tidak/belum pernah sekolah/ tidak/belum tamat, Tingkat SD, Tingkat SMP, Tingkat SMA , Diploma dan sarjana dan digambarkan pada table berikut :

Tabel 4. 4 Perkembangan Penduduk Desa Kuripan

Menurut Pendidikan Terakhir
Tahun 2021

No	Keterangan	Jumlah penduduk
		Tahun 2021
1	Tidak Tamat Sekolah SD	50
2	Tamat Sekolah SD	280
3	Tamat Sekolah SLTP	142
4	Tamat SLTA/Sederajat	131
5	Tamat Akademi/Diploma	17
6	Tamat Sarjana	37

Sumber : Profil Desa

Tabel 4. 5 Angka Putus Sekolah

Tahun 2021

Tahun	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA
2021	-. Orang	- orang	- orang
Jumlah	-. Orang	- orang	- orang

3) Kondisi Sosial Ekonomi

Secara umum kondisi perekonomian desa Kuripan di topang oleh beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: petani, buruh tani, PNS/TNI/Polri, karyawan swasta, pedagang, wirausaha, pensiunan, buruh bangunan/tukang, petemak. jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 6 Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Kuripan

Menurut Mata Pencaharian Tahun 2021

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
		Tahun 2021
1	Petani	100
2	Buruh tani	-
3	Peternakan	3
4	Pedagang	20
5	Wirausaha	2
6	Karyawan Swasta	80
7	PNS/POLRI dan TNI	5
8	Pensiunan	4
9	Tukang Bangunan	10
10	Tukang kayu/ukir	-
11	Nelayan	20
12	Angutan	-
13	Lain-lain	30
	JUMLAH	

Sumber : Profil Desa

Tabel 4. 7 Gambaran Perkembangan Perekonomia desa Kuripan

Tahun 2021		
No	Uraian	Jumlah
		Tahun 2021
1	Angkutan Pedesaan	3
2	Kendaraan Roda 4	-
3	Kedaraan Roda 2	130
4	Bumdesa	-
5	KUD/Koperasi	1
6	Luas tegalan	-
7	Produksi Padi	-
8	Produksi Jagung	-
9	Produksi Kacang	-
10	Produksi Ketela	-
11	Produksi Pertanian Lainnya	-
12	Produksi Perikanan darat/Laut	-
13	Ternak Besar/kerbau/sapi	-
14	Ternak kambing	3 ekor
15	Ternak Ayam	25.000 ekor
16	Luas Pertambangan	-
17	keluarga yang teraliri listrik	670 KK
18	Jumlah Industri	10
19	Lain 2	-

4) Kondisi Sarana Prasarana

Desa Kuripan memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang terdapat di tiap wilayah, yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

5) Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Kuripan belum mempunyai balai desa tapi dengan perangkat desa lengkap. Sedangkan di Desa Kuripan mempunyai 12 RT dikepalai oleh Ketua RT dan 3 RW dikepalai oleh Ketua RW. Kondisi sarana dan prasarana tersebut cukup bagus dan pelayanan kepada masyarakat berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

6) Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana Kesehatan yang ada di desa Kuripan dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 8 Perkembangan Sarana Dan Prasarana Kesehatan

No	Uraian	TAHUN
		2021
1	Puskesmas	
2	Puskesmas Pembantu/PKD	
3	Tenaga medis di puskesmas	
4	Tenaga Non Medis di puskesmas	
5	Toko obat dan Jamu	
6	Apotik	
7	Dokter umum	
8	Dokter Gigi	
9	Dokter spesialis	
10	Mantri kesehatan	1
11	Bidan	1
12	Dukun bayi berijazah	-
13	Posyandu	1

Sumber : Profil Desa

Adapun jarak tempuh terjauh warga desa Kuripan ke puskesmas/Puskesmas pembantu terdekat adalah 0,5 km atau 5 menit apabila ditempuh dengan berjalan kaki. Dan apabila menuju rumah sakit terdekat dapat ditempuh selama 15 menit

7) Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Kuripan mempunyai sekolah dari PAUD sampai sekolah tingkat dasar yang terdapat di beberapa Rukun Tetangga. Dengan rincian:

Tabel 4. 9 Jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan

No .	Jenis Sarana Prasarana	Nama Sarana Prasarana	Lokasi	Jumlah Siswa
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tunas Bangsa	RT 07	28
2	Madrasah Diniyah	Hidayatut Thalibin	RT 01	32
3	SD Negeri	SDN 1	RT 07	60
4	SMP / MTs	-	-	-
5	SMU / SMK / MA	-	-	-

Sumber : Profil Desa

8) Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Kuripan mempunyai masjid dan musholla di tiap Rukun Tetangga dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4. 10 Sarana Prasarana Keagamaan

No.	Jenis Sarana Prasarana	Nama Sarana Prasarana	Lokasi	Kondisi
1	Mesjid	AL-IKHWAN	RT 07	Kurang baik
2	Musholla	AL-HIDAYAH	RT 04	Baik
		AL-HUDA	RT 12	Baik
		-	-	-

Sumber : Profil Desa

9) Sarana dan Prasarana Umum

Pembangunan Infrastruktur akan dihadapkan pada terbatasnya kemampuan Pemerintah Desa untuk menyediakannya. Pada sebagian infrastruktur, pihak Desa telah berhasil menghimpun swadaya masyarakat murni yang terkoordinir di masing-masing RT dan RW.

Tabel 4. 11 Jumlah prasarana dan sarana desa

No	Jenis prasarana & sarana desa	Tahun 2021		
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Jalan ber aspal	-	-	-
2.	Jalan Rabat Beton	1000 M	1500 M	2000 M
3.	Jalan berbatu/tanah	10 km	9 km	8 km
4.	Jembatan kecil	-	-	-
5.	Jembatan sedang/besar	4 bh	5 bh	6 bh
6.	Bendungan	-	-	-
7.	Jaringan irigasi	-	-	-

2. Implikasi Penerapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) Terhadap Pembangunan Jalan Di Desa Kuripan Kabupaten Barito Kuala 2021-2022.

Implikasi penerapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa merujuk pada dampak yang timbul sebagai hasil dari penerapan kebijakan, program, atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Penerapan pemerintah desa berkaitan dengan upaya untuk memajukan dan mengelola wilayah pedesaan, meningkatkan pelayanan publik, memperbaiki infrastruktur, dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan Implikasi penerapan pemerintah desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa Kuripan Kabupaten Barito Kuala” yang

penulis teliti berfokus pada salah satu Prioritas Program Pembangunan Jalan Desa yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kuripan Tahun 2021-2022.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah rencana pembangunan yang dibuat oleh pemerintah desa sebagai panduan untuk pengembangan dan peningkatan desa dalam jangka waktu tertentu, umumnya antara 5 hingga 10 tahun.⁷² RPJMDes bertujuan untuk mengarahkan penggunaan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

RPJMDes berisi visi, misi, tujuan, dan strategi pembangunan desa. Dokumen ini juga mencakup program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tersebut, serta alokasi anggaran yang diperlukan. RPJMDes juga dapat mencakup indikator kinerja dan mekanisme pemantauan serta evaluasi untuk memastikan implementasi dan keberhasilan rencana pembangunan.

Pemerintahan Desa Kuripan menerapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagai panduan untuk melaksanakan pembangunan jalan desa. RPJMDes digunakan sebagai instrumen perencanaan yang komprehensif dan terarah untuk mencapai tujuan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Pemerintahan Desa Kuripan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan proyek pembangunan jalan desa.

⁷²Abdul Rahman, *Formulasi Kebijakan Penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes)*, Pascal Books, 2022, 9-11

Gambar 4. 1 Jalan Desa Kuripan



Dalam RPJMDes Desa Kuripan, terdapat langkah-langkah strategis yang diambil untuk memperbaiki aksesibilitas dan konektivitas melalui pembangunan jalan desa. Melalui konsultasi dengan masyarakat, identifikasi kebutuhan prioritas dilakukan untuk menentukan lokasi pembangunan jalan yang paling dibutuhkan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi penduduk Desa Kuripan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan informan Surya Atmaja yang merupakan kepala desa, beliau menyatakan ;

“Dahulu desa kuripan tidak memiliki akses ke jalan yang tidak ada air atau masyarakat di sini menyebutnya dengan jalan darat. Akses utama adalah transportasi perahu, taksi motor, *speed boat*. Dari pihak pemerintah desa sendiri menggunakan lalu menerapkan Rpjmdes dengan sebaik baiknya, agar tujuan dari Rpjmdes ini tercapai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, hal yang membantu program pembangunan jalan di kuripan dengan adanya Rpjmdes pembangunan jalan bisa lebih gampang di fokuskan dan jalan ini merupakan hal yang sangat darurat karena pastinya akan mempengaruhi ke berbagai sektor masyarakat terutama perekonomian. Perencanaan ini bersifat terbuka jadi masyarakat ikut serta dalam kegiatan pembangunan ini meskipun tidak mencapai 100%”⁷³

Sama seperti informan Surya Atmaja, informan Fahroni menyatakan ;

“prioritas program yang dilakukan adalah berfokus pada pembangunan jalan desa sesuai dengan isi rencana pembanguana jangka menengah desa.

⁷³Surya Atmaja, Kepala Desa, Wawancara Langsung, Kuripan, 20 Desember 2022

Untuk memfokuskan pembangunan ini pemerintah desa pastinya membuat RPJMDes agar lebih terfokus dan terarah dalam proyek pembangunan ini”.⁷⁴

Selaras dengan informan Fahrni, informan Norlinawati pun menyatakan bahwa pembangunan jalan di kuripan merupakan prioritas pembangunan dan hal ini sudah masuk dalam RJPMDes 2021-2022. Ia menyatakan ;

”adapun program prioritas mereka saat ini ialah program pembangunan jalan, program ini sudah di rancang dalam RJPMDes 2021-2022 yang membantu pihak pemerintahan desa agar merealisasikan pembangunan jalan”.⁷⁵

Sedikit berbeda dengan informain lainnya, menurut Muhammad Syahrial yang merupakan aparat desa menuturkan bahwa pembangunan jalan di desa kuripan merupakan program utama yang dilaksanakan sesuai dengan janji awal kepala desa sebelum beliau mencalonkan diri, ia menyatakan bahwa ;

“program yang di prioritaskan pada tahun 2021 dan 2022 adalah pembangunan jalan sesuai janji awal kepala desa sebelum beliau mencalonkan diri. Pembangunan ini harus wajib dilakukan sehingga pemerintahan desa memprioritaskan ini ke dalam RPJMDes yang kita ketahui jangka waktu 5-10 tahun kedepan”.⁷⁶

Menurut informan Usrani selaku Badan Permusyawaratan Desa menyatakan bahwa :

“Pembangunan jalan merupakan rencana infrastruktur yang sangat dasar sangat penting untuk dilaksanakan, apalagi di desa kuripan. Masyarakat tidak boleh terus terusan merasa kesusahan tentang akses jalan, meskipun ada perahu. Pihak desa pun sudah melakukan pembangunan ini secara bertahap melalui RPJMDes yang sudah di rancang. Masyarakat juga pasti akan menagih pembangunan ini agar selesai 100%”.⁷⁷

⁷⁴Fahrni, Kepala Desa, Wawancara Langsung, Kuripan, 20 Desember 2022

⁷⁵Norlinawati, Sektetaris Desa, Wawancara Langsung, Kuripan, 21 Desember 2022

⁷⁶Muhammad Syahrial, Aparat Desa, Wawancara Langsung, Kuripan, 21 Desember 2022

⁷⁷Usrani, Aparat Desa, Wawancara Langsung, Kuripan, 20 Desember 2022

Selain dari informan tambahan yang berada di pemerintahan desa, peneliti mewawancarai 3 warga desa kuripan yang memiliki pekerjaan yang berbeda beda dan rumah yang berjauhan. Hal ini dilakukan agar informasi yang digali oleh peneliti bisa lebih mendalam. Namun hasil wawancara ini tidak menjadi indikator implikasi penerapan RPJMDes dalam penelitian hanya sebagai informasi tambahan yang bersifat sekunder.

Menurut Ahmad Supian yang merupakan Seorang Guru menyertakan bahwa ;

“semalam tuh ada ja pang habar di kantor pembakal jar ada musyawarah desa, imbah itu jalan ni kaina di bangun mulai jadi kada uyuh lagi am malewati jalan rusak senang haja sorang. Tapi imbah habar itu yang talihat ini ya kakaini ai jalan nya kada bujur berataan jua”.⁷⁸

Dari hasil wawancara pada masyarakat beliau mengatakan bahwasanya pada tahap perencanaan masyarakat ikut terlibat, sempat mendengar mengenai akan dilaksanakan pembangunan jalan walaupun awalnya merasa senang karna mendengar kabar tersebut namun akhirnya kecewa karna sampai sekarang pun pembangunan yang dimaksud memang tidak ada ,untuk proses sosialisasi pun tidak pernah mendengar, pembangunan jalan pun tidak dilakukan oleh pemerintah desa.

hal ini berbeda dengan informan Singgih beliau menyatakan bahwa ;

“buan pembakal kadada pang behabaran apa apa tu lah. Pas tahun 2021 gen pembangunan jalan di cor semen ja itu gen kada berataan. Bukti proyeknya gin kadada jua”.⁷⁹

Hasil wawancara pada masyarakat pada proses perencanaan dan pelaksanaan tidak ada ajakan pemerintah mengayomi masyarakat untuk

⁷⁸Dirmansyah, Masyarakat Desa, Wawancara Langsung, Kuripan, 22 Desember 2022

⁷⁹Singgih, Masyarakat Desa, Wawancara Langsung, Kuripan, 22 Desember 2022

melakukan pembangunan jalan, Pada tahun 2021 ada pembangunan itu pun hanya pengecoran semen saja dan tidak semua jalan yang di cor.

Menurut Hadiat ia menyatakan bahwa ;

“kadada pang buhan desa tu sosialisasi pembangunan jalan ni, dibawai gasan me anggar akan rencana anggaran gin kadada jua. Matan 2021 sampai wahini jalan kadada beres jua kakaini aja”.⁸⁰

wawancara pernyataan dari Hadiat beliau merasa tidak ada bagian dari pemerintah desa mengajak untuk proses perencanaan pembangunan , Pada tahun 2021 bahkan sampai sekarang pun tidak ada kalau pun mereka mengatakan ada seharusnya dapat mebuktkannya secara transfran dimana pembangunan yang dimaksud.

Menanggapi hal ini kepala desa kuripan menyatakan bahwa ;

“pihak kami pastinya mengajak masyarakat untuk dilibatkan dalam pembangunan. Untuk kerjasama untuk keterbukaan dana yang ada dalam rancangan anggaran yang ada”.⁸¹

Hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh Fahrni selaku sekretaris desa Kuripan, beliau menyatakan bahwa ;

“pembangunan jalan desa memerlukan unsur masyarakat itu sudah pasti, namun kadang ada saja masyarakat yang tidak mau memperhatikan apa yang menjadi program pemerintah yang ada”.⁸²

Menanggapi kenyataan lapangan bahwa masyarakat merasa tidak dilibatkan, menurut Norlinawati yang merupakan aparat Desa beliau menyatakan bahwa ;

“masyarakat kita memiliki background pendidikan yang berbeda kesibukan yang berbeda, dan ini sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Jika di

⁸⁰Hadiat, Masyarakat Desa, Wawancara Langsung, Kuripan, 22 Desember 2022

⁸¹Fahrni, Sekretaris Desa, Wawancara Langsung, Kuripan, 22 Desember 2022

⁸²Norlinawati, Aparat Desa, Wawancara Langsung, Kuripan, 22 Desember 2022

bandingkan sepertinya masih banyak yang bersikap bodo amat di banding yang ingin mengetahui secara jelas.padaahal pemerintah desa sudah memberikan arahan bahwa akan ada pembangunan jalan adanya rancangan anggaran. Ya bisa di katakan masih ada missskom”.⁸³

Penegasan dari informan Norlinawati merupakan temuan penting yang bisa menepiskan opini masyarakat perihal pembangunan jalan dan rencana pembangunan yang ada ini. Adapun alasan peneliti kenapa hanya melibatkan 3 masyarakat saja karena lebih banyak masyarakat yang bersikap apatis terkesan tidak peduli terhadap apa yang akan di rancang atau hal hal yang berkaitan dengan desa.

Pemerintahan Desa Kuripan juga bekerja sama dengan pihak terkait, seperti dinas terkait dan lembaga swadaya masyarakat, dalam melaksanakan proyek pembangunan jalan desa. Melalui pendekatan ini, sumber daya dan pengetahuan yang diperlukan untuk merencanakan, mengawasi, dan mengimplementasikan pembangunan jalan desa dapat dimanfaatkan secara efektif. Peran masyarakat sangat penting dalam melaksanakan kegiatan ini maka dari itu penerapan RPJMDes yang dilakukan oleh pemerintahan desa harus bersifat terbuka kepada masyarakat.

Dengan menggunakan RPJMDes sebagai pedoman, Pemerintahan Desa Kuripan memastikan bahwa pembangunan jalan desa dilaksanakan dengan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Selain itu, upaya pemeliharaan dan perawatan jalan desa juga menjadi fokus untuk memastikan keberlangsungan dan keandalan infrastruktur yang dibangun.

⁸³Usrani , Aparat Desa, Wawancara Langsung, Kuripan, 20 Desember 2022

Melalui pendekatan ini, Pemerintahan Desa Kuripan berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi lokal, dan mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan. Dengan mengadopsi RPJMDes, Desa Kuripan berharap dapat mencapai tujuan pembangunan jalan desa yang berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakatnya.

Untuk memudahkan pembaca, peneliti membuat rekapitulasi ringkasan hasil wawancara.

REKAPITULASI HASIL WAWANCARA INFORMAN

No	Identitas	Hasil Wawancara
1	Informan 1 Nama : Surya Atmaja Umur : 70 Tahun Pekerjaan : Kepala Desa Alamat : Desa Kuripan Kabupaten Barito Kuala	Dari hasil wawancara dari pernyataan kepala desa bahwa dalam tahap perencanaan pembuatan program pembangunan jalan Desa melibatkan unsur masyarakat, namun mereka tidak sering melakukan pertemuan karna kondisi kesehatan kepala desa yang sering masuk Rumah Sakit. Adapun program prioritas pembangunan saat ini ialah pembangunan jalan Desa mengingat langkah awal visi misi kepala desa adalah pembangunan jalan desa. Untuk mengawasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa Badan Permusyawarata (BPD) dalam tahap pelaksanaanya juga terlibat. Papan proyek memang dibutuhkan agar menjadi bukti pembangunan namun kepala desa mengakui bahwa untuk urusan papan proyek mereka hanya melakukan sesi dokumentasi sebagai bukti ketika ditanya mengenai dokumentasi yang dimaksud beliau

		<p>tidak bisa memberikan buktinya. Tentu saja menurut beliau pembangunan jalan desa ini terealisasi dengan baik karna kepala desa beserta para staf nya melakukan usaha semaksimal mungkin untuk dapat diwujudkan nya pembangunan yang baik beserta sesuai dengan kehendak rakyat dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakatlah pembangunan ini bisa diwujudkan. Harapan besar terhadap pembangunan jalan agar membantu perekonomian masyarakat. Dahulu desa kuripan tidak memiliki akses ke jalan yang tidak ada air atau masyarakat di sini menyebutnya dengan jalan darat. Akses utama adalah transportasi perahu, taksi motor, <i>speed boat</i>. Dari pihak pemerintah desa sendiri menggunakan lalu menerapkan Rpjmdes dengan sebaik baiknya, agar tujuan dari Rpjmdes ini tercapai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, beliau menuturkan bahwa dengan adanya Rpjmdes pembangunan jalan bisa lebih gampang di fokuskan dan jalan ini merupakan hal yang sangat darurat karena pastinya akan mempengaruhi ke berbagai sektor masyarakat terutama perekonomian.</p>
2	<p>Identitas informan 2 Nama : Fahroni Umur : 32 Tahun Pekerjaan : Sekertaris Desa Alamat :Desa Kuripan Kabupaten Barito Kuala</p>	<p>Dari hasil wawancara dengan sekretaris desa bahwa dalam pembuatan program perencanaan pembangunan jalan desa unsur masyarakat memang diperlukan namun kadang masyarakat tidak mau memperhatikan apa yang menjadi program pemerintah dalam pembangunan</p>

		<p>sehingga partisipasi masyarakatnya rendah, untuk masalah apakah sering dilakukan pertemuan nyatanya memang tidak sering dilakukan untuk membahas tentang pembangunan ini disebabkan oleh kondisi kesehatan kepala desa sebagai pelaksana pembangunan, prioritas program yang dilakukan adalah berfokus pada pembangunan jalan desa sesuai dengan isi rencana pembanguana jangka menengah desa. Adapun anggota BPD sebagai pengawas pembangunan juga terlibat didalamnya. Menanggapi pertanyaan mengenai papan proyek beliau tidak menjawab secara spesifik hanya mengatakan memang dibutuhkan. Sekertaris desa mengatakan bahwa pembanguan yang diprogramkan sudah berjalan dengan baik sehingga dalam tahap pelaksanaannya pun sudah dilakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan masyarakat. Beliau menuturkan dengan adanya Rpjmdes di tingkat desa, sangat membantu pemerintah desa dalam memfokuskan pembangunan terutama jalan yang sedang dalam proses. Pembangunan jalan menjadi masalah sentral yang mempengaruhi banyak kegiatan masyarakat. Rpjmdes membantu pemerintah desa memanfaatkan anggaran dengan sebaik baiknya karena dalam jangka waktu menengah dan pembangunan jalan harus sudah selesai. Beliau menuturkan pembangunan ini bersifat terbuka sehingga masyarakat mengetahui hal ini.</p>
--	--	---

3	<p>Identitas Informan :</p> <p>Nama : Norlinawati</p> <p>Umur : 35 Tahun</p> <p>Pekerjaan:Aparat Desa</p>	<p>Dari hasil wawancara dengan seksi pemerintahan desa beliau mengatakan masyarakat merupakan peran penting untuk mewujudkan pembangunan yang baik mereka sudah melibatkan dengan menggunakan asas demokrasi sehingga masyarakatpun berhak dalam pembentukan perencanaan, pertemuan tidak sering dilakukan mengingat kondisi kepala desa saat itu tidak memungkinkan maka mereka hanya melakukan pertemuan sesekali saja , adapun program prioritas mereka saat ini ialah program pembangunan jalan, BPD juga harus terlibat didalamnya untuk mengawasi jalannya pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah desa. Untuk membuktikan pembangunan memang dilaksanakan biasanya pembangunan itu memang dibutuhkan Papan Peoyek serta dokumentasi yang diperlukan namun, mereka kesulitan menemukan bukti dokumentasi tersebut, pembangunan jalan desa sudah dilakukan dengan baik dan sudah direalisasikan pada proses pembangunannya pun sudah mereka sosialisasikan dulu dengan masyarakat. Hal ini memang jarang sekali di pedulikan masyarakat namun sebagai bukti bahwa pembangunan jalan ya dengan itu satu satunya sehingga masyarakat percaya, selain itu pembangunan ini pun diketahui oleh masyarakat meski tidak menyeluruh karena keadaan warga yang notabene nya bekerja di sawit dan pulang ke rumah hanya untuk istirahat.</p>
---	---	---

4	<p>Nama : Muhammad Syahrial</p> <p>Umur : 30 Tahun</p> <p>Pekerjaan : Aparat Desa</p>	<p>Dari hasil wawancara dengan seksi kesejahteraan dan pelayanan beliau mengatakan untuk mewujudkan suatu perencanaan yang terarah maka memang dibutuhkan keterlibatan unsur masyarakat karna dengan melaksanakan kegiatan yang dilakukan tentulah mereka melakukan semuanya demi masyarakat makanya masyarakat berhak tahu dalam segala prosesnya. Pertemuan tidak sering dilakukan karna kondisinya tidak memungkinkan bagi kepala desa untuk menghadiri pertemuan tersebut, program yang mereka prioritaskan pada tahun 2021 dan 2022 adalah pembangunan jalan sesuai janji awal kepala desa sebelum beliau mencalonkan diri. Anggota BPD terlibat langsung dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk sebagai saksi mengenai terjalankannya program ini, Sesi dokumentasi dan pemasangan papan proyek dalam pembangunan itu memang perlu namun mereka tidak bisa membuktikan papan proyek serta dokumen yang dimaksud. Pembangunan jalan ini sudah dilaksanakan pemerintah desa setelah beliau menyusun rencana pembangunan melalui Rpjmdes yang sangat membantu pemerintah desa agar lebih terarah dan fokus dalam pembangunan jalan, maka bisa disebutkan rencana pembangunan ini sudah direalisasikan dengan baik , pada proses pembangunannya pun sudah mereka sosialisasikan dulu dengan masyarakat sekitar.</p>
---	---	--

5	<p>Nama : S.I, S.Pd</p> <p>Umur : 26 Tahun</p> <p>Pekerjaan:Aparat Desa</p>	<p>Dari hasil wawancara dengan seksi urusan umum dan perencanaan bahwa dalam tahap perencanaan memang diperlukan perencanaan sesuai dengan prosedur perencanaan serta pelaksanaan RPJM Desa, untuk sesi pertemuan jarang dilakukan mengingat kepala desa serta Sekretaris desa lebih sering menghabiskan waktu di Banjar dibanding di desa beserta kondisi kepala desa yang kurang stabil. Pembangunan jalan desa merupakan program yang memang diprioritaskan oleh mereka, Untuk menjalankan prosedur perencanaan serta pelaksanaan pembangunan tentulah BPD juga ikut dilibatkna dalam prosesnya karna merupakann perwakilan dari masyarakat secara langsung. Papan proyek serta dokumentasi itu perlu namun beliau mengatakan memang melaksanakan pembangunan jalan dengan baik walaupun tanpa bukti tersebut, pada proses pembangunannya pun sudah mereka sosialisasikan dulu dengan masyarkat.</p>
6	<p>Nama : Nor Husnul Hatimah, S.Pd</p> <p>Umur : 29 Tahun</p> <p>Pekerjaan: Aparat Desa</p>	<p>Dari hasil wawancara dengan seksi urusan keuangan beliau kurang mengerti apakah masyarakat luar juga perlu ikut serta dalam pembangunan ini ,namun pasti lah unsur masyarakat itu penting, untuk pertemuan memang jarang dilakukan untuk membahas pelaksanaan pembangunan ini. Pembangunan jalan desa menjadi prioritas kami pada tahun 2021 Dan 2022 ,BPD sebagai saksi dari masyarakat perlu hadir pada setiap perencanaan</p>

		<p>dan pelaksanaan untuk terpenuhinya syarat perencanaan yang baik sesuai dengan isian RPJM Desa. Untuk penggunaan papan proyek beliau mengaku kurang mengerti menanggapi hal tersebut, namun rencana pembangunan jalan desa sudah direalisasikan dengan baik mengingat ABPDes yang diberikan oleh pemerintah untuk dapat direalisasikan dengan baik, pada proses pembangunannya pun sudah mereka sosialisasikan dulu dengan masyarakat..</p>
7	<p>Nama : Usrani Umur : 42 Tahun Pekerjaan : BPD/Badan Permasyarakatan Masyarakat.</p>	<p>Dari hasil wawancara dengan ketua BPD beliau mengatakan untuk tahap perencanaan masyarakat memang seharusnya terlibat langsung dengan pembangunan ini, untuk setiap pertemuan yang dilakukan beliau kurang tahu mengenai hal itu. Adapun program prioritas desa pada saat ini adalah pembangunan jalan desa karna tentu saja masyarakat menagih janji dari kepala desa sebelum masa jabatannya mengenai pembangunan jalan, beliau mengatakan untuk tahap pelaksanaan seharusnya memang ikut berpartisipasi namun pelaksanaan yang dimaksud tidak pernah ada . Papan proyek pembangunan jalan serta dokumentasi pun tidak ada saat itu maka beliau beranggapan pembangunan jalan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tidak terealisasikan dengan baik.</p>
8	<p>Nama : Ahmad Supian</p>	<p>Dari hasil wawancara dengan masyarakat beliau mengatakan pada proses perencanaan</p>

	<p>Pekerjaan:Guru Madrasah/Petani Sawit Umur : 52 Tahun Alamat: Desa Kuripan Kabupaten Barito Kuala</p>	<p>beliau sendiri sebagai masyarakat tidak ada yang tahu mengenai perencanaan itu, sehingga program yang saat itu dijalankan pun tidak mengetahuinya, beliau mengatakan masih merasa resah dengan konsidi jalan yang dimaksud karna tidak adanya pembangunan jalan yang dilakukan pemerintah sejak awal beliau menjabat, beliau berpendapat seharusnya ada sikap tranfaransi dari pemerintah mengenai pembangunan ini dengan proses sosialisasi namun fakta mengatakan tidak.</p>
9	<p>Nama : Dirmansyah Umur : 49 Tahun Pekerjaan: Petani Sawit Alamat : Desa Kuripan KabupatenBarito Kuala</p>	<p>Dari hasil wawancara pada masyarakat beliau mengatakan bahwasanya pada tahap perencanaan masyarakat ikut terlibat, sempat mendengar mengenai akan dilaksanakan pembangunan jalan walaupun awalnya merasa senang karna mendengar kabar tersebut namun akhirnya kecewa karna sampai sekarang pun pembangunan yang dimaksud memang tidak ada ,untuk proses sosialisasi pun tidak pernah mendengar, pembangunan jalan pun tidak dilakukan oleh pemerintah desa.</p>
10	<p>Nama : Singgih Umur : 32 Tahun Pekerjaan: Pegawai swasta</p>	<p>Dari hasil wawancara pada masyarakat pada proses perencanaan dan pelaksanaan tidak ada ajakan pemerintah mengayomi masyarakat untuk melakukan pembangunan jalan,Pada tahun 2021 pernah ada pembangunan namun tidak merata, yang di maksud seandainya ada secara jelas dimana pemerintah mengerjakannya dan kapan waktunya tidak dinyatakan secara jelas, tidak ada sosialisasi dan</p>

		bukti papan proyek pada saat itu dokumentasi pun tidak ada.
11	Nama : Nendy Fegy Umur : 48 Tahun Pekerjaan : Petani Sawit	Dari hasil wawancara dengan masyarakat tidak begitu paham mengenai perencanaan yang dimaksud namun untuk mendengar pemerintah desa mengayomi masyarakat untuk melakukan perencanaan itu tidak pernah, tidak ada pembangunan jalan pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, sosialisasi pun tidak ada , seandainya ada seharusnya mereka bisa membuktikannya.
12	Nama : Hadiat Umur : 42 Tahun Pekerjaan : Bengkel	Dari hasil wawancara pernyataan dari masyarakat beliau merasa tidak ada bagian dari pemerintah desa mengajak untuk proses perencanaan pembangunan ,Pada tahun 2021 bahkan sampai sekarang pun tidak ada kalau pun mereka mengatakan ada seharusnya dapat mebuktikannya secara transfran dimana pembangunan yang dimaksud.

Secara garis besar dari hasil temuan dilapangan bahwa pembangunan jalan di desa Kuripan merupakan prioritas pembangunan. Implikasi RPJMDes Kuripan menjadi instrumen penting berdampak baik yang digunakan untuk memfokuskan dan mengarahkan pembangunan jalan desa serta merencanakan penggunaan anggaran yang sesuai.

3. Kendala Penerapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RjpmDes) Terhadap Pembangunan Jalan Di Desa Kuripan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021-2022

Berlanjut pertanyaan kendala yang dialami dalam rencana pembangunan, wawancara dengan informan Surya Atmaja , beliau menyatakan bahwa :

“semua hal pasti ada kendala dan itu sudah pasti, termasuk dalam rencana pembangunan jalan ini, yang pertama adalah kekurangan sumber daya manusia nah ini yang menjadi faktor utama contohnya dalam pembangunan proyek jalan ini belum ada borongan yang berani mengambil proyek ini sehingga kami dari desa hanya mengerahkan tukang tukang bangunan yang hanya ada desa saja, yang ke dua desa kuripan ini berada di pinggir sungai barito dan banyaknya perkebunan sawit, jika hujan deras otomatis jalan akan terendam. Hal ini juga yang membuat masyarakat pasti berpikiran bahwa pembangunan jalan tidak ada padahal ada. Dalam RPJMDes ini kami memaksimalkan mungkin agar berjalan dengan baik”.⁸⁴

Peneliti menangkap bahwa Dalam konteks pembangunan jalan ini, seperti halnya dalam semua hal, pasti akan ada hambatan yang dihadapi. Kekurangan sumber daya manusia menjadi faktor utama yang menjadi hambatan dalam proyek pembangunan jalan ini. Misalnya, belum ada pihak kontraktor yang berani mengambil proyek ini, sehingga hanya tukang bangunan dari desa yang dikerahkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Selain itu, desa Kuripan berada di pinggir Sungai Barito dan terdapat banyak perkebunan sawit di sekitarnya. Hal ini menyebabkan jalan mudah terendam saat hujan deras. Kondisi ini juga membuat masyarakat berpikiran bahwa pembangunan jalan tidak ada, meskipun sebenarnya proyek tersebut ada.

Namun, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), pihak desa berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan proyek

⁸⁴Surya Atmaja, Kepala Desa , Wawancara Langsung, Kuripan, 23 Desember 2022

ini dengan baik, mengatasi hambatan-hambatan yang ada, dan memastikan pembangunan jalan berjalan lancar.

Simpulannya, dalam pembangunan jalan ini, hambatan yang dihadapi meliputi kekurangan sumber daya manusia dan kondisi geografis yang menyebabkan jalan mudah terendam. Meskipun demikian, pihak desa berkomitmen untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan melaksanakan proyek pembangunan jalan dengan baik sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Selanjutnya wawancara dengan informan Fahroni, beliau menyatakan bahwa ;

“lebih pada anggota aparat desa dan BPD, karena latar belakang pendidikan yang berbeda beda jadi tingkat pemahaman dalam contoh saja ni pembuatan Rancangan dan Anggaran saja masih ada yang belum memahami ini, lalu rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam sadarnya terhadap penerbitan desa misal sekedar untuk peduli pada musyawarah desa yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa Kuripan. selain itu lingkungan, desa kuripan ini berada sejajar dengan sungai terbesar jadi tiap selesai pembangunan jalan air di sungai pasang sehingga masuk ke pemukiman ini pun kami pihak pemerintah desa selalu memikirkan solusinya. Di tambah dengan adanya luapan air dari sawit. Hal ini yang menjadi hambatan”.⁸⁵

Menurut beliau dalam pembangunan jalan di Desa Kuripan, terdapat beberapa hambatan yang dapat diidentifikasi berdasarkan kalimat tersebut. Simpulan dari kalimat tersebut adalah: Perbedaan latar belakang pendidikan anggota aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kuripan dapat menjadi hambatan dalam pemahaman terkait pembuatan Rancangan dan Anggaran. Beberapa anggota mungkin belum sepenuhnya memahami proses tersebut.

⁸⁵Fahroni, Sekretaris Desa , Wawancara Langsung, Kuripan, 23 Desember 2022

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kesadaran terhadap pemerintahan desa, seperti kurangnya kepedulian terhadap musyawarah desa yang dilakukan oleh BPD Kuripan. Lingkungan geografis Desa Kuripan yang berada sejajar dengan sungai terbesar menjadi hambatan. Setelah pembangunan jalan selesai, air dari sungai dapat memasuki pemukiman karena pasang sungai. Selain itu, luapan air dari perkebunan sawit juga menjadi masalah yang mempengaruhi kelancaran pembangunan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, perlu dilakukan upaya yang terarah dan terkoordinasi antara aparat desa, BPD, dan masyarakat. Penyuluhan dan pendidikan dapat diberikan kepada anggota aparat desa dan BPD untuk meningkatkan pemahaman terkait proses perencanaan dan anggaran. Selain itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesadaran terhadap pemerintahan desa dan pentingnya musyawarah desa. Untuk mengatasi masalah lingkungan, perlu dilakukan upaya penanganan banjir dan pengelolaan air yang efektif.

Untuk menambah informasi agar lebih mendalam, peneliti melanjutkan wawancara dengan informan Usrani masih dengan pertanyaan yang sama. Beliau menyatakan ;

“hambatan rencana pembangunan jangka menengah ini yang pertama adalah sumber daya manusia, kenapa saya sebutkan demikian karena pemahaman setiap orang berbeda beda, yang bekerja di pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa memiliki pemahaman, pendidikan yang beragam menjadi hambatan yang sudah biasa terjadi apalagi dalam kegiatan musyawarah bersama desa. Selanjutnya, partisipasi masyarakat yang rendah, hal ini termasuk dalam kesadaran, pemahaman masyarakat yang berbeda namun kenyataan lapangan di desa Kuripan adalah masyarakat kurang antusias dalam membangun desa dan masih ada yang tidak peduli terhadap pembangunan yang ada. Lalu tentang geografis, hal

ini menjadi hambatan dalam pembangunan jalan 70% desa kuripan ini banyak air, sisanya daratan. Apabila hujan deras sejam atau 3 jam sudah pasti terendam dan pondasi jalan menjadi terbawa arus sehingga menjadi rusak kembali”.⁸⁶

Dalam wawancara ini menerangkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di Desa Kuripan menghadapi beberapa hambatan yang perlu diatasi. Hambatan-hambatan tersebut meliputi sumber daya manusia dengan pemahaman dan pendidikan yang beragam di antara anggota pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa, rendahnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa serta kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pembangunan, dan masalah geografis terkait kondisi air yang dapat menyebabkan banjir dan kerusakan pondasi jalan saat hujan deras.

Untuk mengatasi hambatan ini, perlu dilakukan upaya seperti penyuluhan, pendidikan, dan pemahaman yang lebih baik kepada anggota pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. Selain itu, penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kampanye kesadaran dan membangun antusiasme serta pemahaman yang lebih baik tentang manfaat pembangunan. Dalam menghadapi masalah geografis, langkah-langkah seperti perencanaan tata ruang yang baik, drainase yang efektif, dan pemilihan material yang sesuai untuk jalan perlu dipertimbangkan agar pembangunan jalan dapat mengatasi kendala yang diakibatkan oleh kondisi lingkungan.

Simpulan tersebut menunjukkan bahwa hambatan-hambatan dalam RPJM di Desa Kuripan melibatkan pemahaman dan pendidikan, partisipasi masyarakat, dan kondisi geografis yang mempengaruhi pembangunan jalan.

⁸⁶Usrani, Badan Permusyawaratan Desa , Wawancara Langsung, Kuripan, 23 Desember 2022

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memiliki peran yang sangat penting, secara langsung sangat berperan dalam mendorong masyarakat agar lebih berkembang dengan pembangunan desa yang baik. Ada pun hambatan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa tentang pembangunan jalan desa kuripan kabupaten barito kuala menjadi 3, pertama keterbatasan sumber daya manusia dengan adanya permasalahan kurangnya kapasitas dan pemahaman tentang RPJMDes, keadaan geografis desa dan rendahnya partisipasi masyarakat desa. Hal ini akan peneliti bahas dalam analisis dan pembahasan.

B. Analisis Data

1. Implikasi penerapan rencana pembangunan jangka menengah desa (Rjpmdes) terhadap pembangunan jalan di desa kuripan kabupaten barito kuala tahun 2021-2022

Pemerintahan Desa Kuripan menerapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagai panduan untuk melaksanakan pembangunan jalan desa. RPJMDes digunakan sebagai instrumen perencanaan yang komprehensif dan terarah untuk mencapai tujuan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Pemerintahan Desa Kuripan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan proyek pembangunan jalan desa.

Dalam Rancangan pembangunan jangka menengah desa kuripan, pemerintahan desa berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan desa yang merupakan akses yang selalu dilewati oleh masyarakat.

Dalam RPJMDes Desa Kuripan, terdapat langkah-langkah strategis yang diambil untuk memperbaiki aksesibilitas dan konektivitas melalui pembangunan

jalan desa. Melalui konsultasi dengan masyarakat, identifikasi kebutuhan prioritas dilakukan untuk menentukan lokasi pembangunan jalan yang paling dibutuhkan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi penduduk Desa Kuripan. Pemerintah desa kuripan menyediakan jalan yang layak untuk masyarakat. Hal ini selaras dengan Teori Menurut Sondang P.Siagian Pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

Menurut teori ini, pembangunan jalan yang baik dapat meningkatkan konektivitas antara daerah dan memfasilitasi aliran barang, jasa, dan tenaga kerja. Infrastruktur jalan yang memadai juga dapat menurunkan biaya logistik, meningkatkan efisiensi produksi, dan mendorong investasi sektor swasta. Dalam konteks pembangunan jalan, pemerintah berperan sebagai pemodal utama yang membiayai dan mengelola proyek-proyek infrastruktur tersebut.⁸⁷

Menurut Riyadi dan Deddy Supriady Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Pemerintah dalam praktiknya sering menggunakan pendekatan dan teori ini untuk merencanakan, membiayai, dan mengelola pembangunan jalan. Pendekatan yang dipilih akan bergantung pada situasi dan konteks negara, seperti

⁸⁷Agus Salim, *Ekonomi Politik Internasional: Peran Domestik hingga Ancaman Globalisasi*, 33-36

tingkat pembangunan, kebijakan publik, dan sumber daya yang tersedia. Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan keberlanjutan dalam pembangunan jalan untuk memastikan dampak yang positif dalam jangka panjang.

Gambar 4. 2 Proses Pengerjaan Perbaikan Jalan Di Desa Kuripan



Implikasi penerapan pemerintah desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa Kuripan Kabupaten Barito Kuala yang penulis teliti berfokus pada salah satu Prioritas Program Pembangunan Jalan Desa yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kuripan Tahun 2021-2022.

Implikasi penerapan pemerintah desa merujuk pada dampak yang timbul sebagai hasil dari penerapan kebijakan, program, atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Penerapan pemerintah desa berkaitan dengan upaya untuk memajukan dan mengelola wilayah pedesaan, meningkatkan pelayanan publik, memperbaiki infrastruktur, dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa

RPJMDes membantu pemerintah desa Kuripan dalam mengarahkan dan memfokuskan upaya pembangunan jalan desa. Melalui RPJMDes, prioritas program pembangunan dapat ditentukan secara lebih terarah dan spesifik, termasuk dalam hal pembangunan jalan. Menentukan Prioritas Program Pembangunan, RPJMDes membantu pemerintah desa Kuripan dalam menetapkan prioritas program pembangunan secara lebih terarah dan spesifik. Melalui RPJMDes, pemerintah desa dapat melakukan identifikasi terhadap kebutuhan utama masyarakat terkait pembangunan jalan desa. Prioritas ini mencakup aspek-aspek seperti peningkatan aksesibilitas, konektivitas, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menetapkan prioritas yang jelas, pemerintah desa dapat memfokuskan upaya dan sumber daya yang dimiliki untuk pembangunan jalan desa.

Selain itu, RPJMDes menjadi acuan dalam merencanakan penggunaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembangunan jalan desa. Dalam RPJMDes, pemerintah desa dapat mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk pembangunan jalan desa berdasarkan prioritas program yang telah ditetapkan. Hal ini memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pembangunan jalan desa.

Adanya RPJMDes, pemerintah desa dapat membuat rencana pembangunan jalan desa yang terarah. Rencana tersebut mencakup berbagai aspek seperti perencanaan teknis, pemilihan material yang tepat, pengawasan pelaksanaan, serta pemeliharaan dan perawatan jalan. Dengan memiliki rencana yang terarah, pemerintah desa dapat menghindari tindakan yang bersifat ad-hoc

dan memastikan bahwa setiap tahap pembangunan jalan desa dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Bukan hanya itu RPJMDes membantu pemerintah desa dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk pembangunan jalan desa. Dalam RPJMDes, pemerintah desa dapat melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia, keuangan, maupun sumber daya alam yang relevan dengan pembangunan jalan desa. Dengan penilaian yang matang, pemerintah desa dapat mengalokasikan sumber daya secara tepat guna untuk mencapai hasil yang optimal dalam pembangunan jalan desa.

Meskipun kesadaran masyarakat desa Kuripan rendah terhadap RJPMDes, secara langsung RPJMDes memberikan kesempatan bagi keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan jalan desa. Dalam penyusunan RPJMDes, pemerintah desa dapat melibatkan masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa dan menggali aspirasi serta kebutuhan masyarakat terkait pembangunan jalan desa. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah desa dapat memastikan bahwa prioritas program pembangunan jalan desa mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh.

Hal ini memungkinkan pemerintah desa untuk merencanakan penggunaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembangunan jalan desa. Dengan adanya fokus dan pengarah pembangunan melalui RPJMDes, pemerintah desa Kuripan dapat mengarahkan upaya pembangunan jalan desa secara lebih terencana dan terarah.

Hal ini memungkinkan penggunaan anggaran yang sesuai, pembangunan yang terorganisir, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Dalam keseluruhan, RPJMDes memberikan landasan yang kokoh untuk pembangunan jalan desa yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

RPJMDes menyediakan kerangka perencanaan yang terstruktur dan terukur untuk pembangunan jangka menengah di desa. Dalam hal pembangunan jalan, RPJMDes membantu dalam menyusun rencana, tujuan, sasaran, indikator, dan target yang spesifik terkait pembangunan jalan desa. Dengan adanya kerangka perencanaan yang jelas, pemerintah desa dapat mengatur langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai pembangunan jalan yang diinginkan.

Alat Perencanaan yang Terstruktur merujuk pada Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang memberikan kerangka perencanaan yang Kerangka Perencanaan yang Jelas, RPJMDes menyediakan kerangka perencanaan yang jelas bagi pemerintah desa Kuripan dalam merencanakan pembangunan jangka menengah. Dalam hal pembangunan jalan desa, RPJMDes membantu dalam menyusun rencana yang terstruktur dengan tahapan-tahapan yang jelas dan terorganisir. Hal ini memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam pembangunan jalan desa memiliki arah yang jelas dan terencana.

Rencana yang Spesifik melalui RPJMDes, pemerintah desa dapat menyusun rencana pembangunan jalan desa yang spesifik. Rencana ini mencakup tujuan, sasaran, indikator, dan target yang terkait dengan pembangunan jalan desa. Tujuan dan sasaran yang spesifik membantu pemerintah desa dalam mengarahkan upaya pembangunan dan mengukur kemajuan yang dicapai. Indikator dan target yang ditetapkan dalam RPJMDes memberikan ukuran yang terukur untuk mengevaluasi pencapaian dalam pembangunan jalan desa.

Perencanaan yang Terukur, RPJMDes menyediakan alat perencanaan yang terukur untuk pembangunan jalan desa. Dalam RPJMDes, pemerintah desa menetapkan indikator kinerja yang dapat diukur secara objektif. Indikator ini membantu dalam mengukur dan memantau kemajuan pembangunan jalan desa. Dengan adanya perencanaan yang terukur, pemerintah desa dapat mengidentifikasi keberhasilan dan kendala dalam pembangunan jalan desa, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Pengaturan Langkah-langkah yang Diperlukan, Melalui RPJMDes, pemerintah desa dapat mengatur langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai pembangunan jalan desa yang diinginkan. RPJMDes menyediakan panduan dalam merencanakan kegiatan-kegiatan yang spesifik, seperti perencanaan teknis, pemilihan material, pelibatan masyarakat, pemantauan, dan evaluasi. Dengan adanya kerangka perencanaan yang terstruktur, pemerintah desa dapat mengelola pembangunan jalan desa secara sistematis dan efisien.

Dengan adanya alat perencanaan yang terstruktur melalui RPJMDes, pemerintah desa Kuripan dapat menyusun rencana pembangunan jalan desa dengan lebih terorganisir dan terarah. Rencana yang spesifik dan terukur membantu dalam mengukur kemajuan pembangunan serta mengevaluasi keberhasilan pencapaian. Selain itu, pengaturan langkah-langkah yang diperlukan memastikan bahwa pembangunan jalan desa dilakukan secara terencana dan efisien. Dengan demikian, RPJMDes menjadi alat perencanaan yang penting bagi pemerintah desa dalam mencapai pembangunan jalan desa yang diinginkan.

RPJMDes membantu pemerintah desa Kuripan dalam pengalokasian anggaran yang tepat untuk pembangunan jalan desa. Melalui RPJMDes, rencana anggaran yang terkait dengan pembangunan jalan desa dapat disusun dengan mempertimbangkan prioritas dan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam RPJMDes. Pengalokasian anggaran yang tepat memungkinkan pemerintah desa untuk mengidentifikasi dan mengalokasikan sumber daya keuangan secara bijak, dengan memperhatikan kebutuhan dan prioritas pembangunan jalan desa. RPJMDes membantu pemerintah desa dalam memastikan bahwa anggaran desa digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan jalan desa yang telah ditetapkan dalam RPJMDes.

Dengan adanya pengalokasian anggaran yang tepat, pemerintah desa dapat menghindari pemborosan anggaran dan memaksimalkan penggunaan sumber daya keuangan untuk pembangunan jalan desa. Pengalokasian anggaran yang tepat juga memastikan bahwa pembangunan jalan desa dapat dilakukan secara bertahap dan terencana, dengan mengutamakan kebutuhan yang paling mendesak dan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Dengan demikian, RPJMDes menjadi instrumen penting dalam pengelolaan anggaran desa yang terkait dengan pembangunan jalan desa, dengan tujuan akhir untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan pembangunan tersebut.

Dalam keseluruhan, pengalokasian anggaran yang tepat melalui RPJMDes memainkan peran penting dalam memastikan penggunaan sumber daya keuangan yang efisien dan efektif untuk pembangunan jalan desa di Desa Kuripan.

RPJMDes memberikan kesempatan bagi partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan jalan desa. Dalam penyusunan RPJMDes, pemerintah desa

melibatkan masyarakat dalam proses musyawarah desa, diskusi terbuka, dan pendapat umum. Dengan melibatkan masyarakat, RPJMDes mencerminkan aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat terkait pembangunan jalan desa. Partisipasi masyarakat ini juga dapat menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap pembangunan jalan desa.

Melibatkan masyarakat dalam penyusunan RPJMDes memastikan bahwa rencana pembangunan jalan desa mencerminkan aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian, pembangunan jalan desa dapat lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes juga dapat menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap pembangunan jalan desa. Dengan merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat lebih cenderung mendukung dan ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan jalan desa. Di desa Kuripan masyarakatnya sendiri sedikit banyaknya acuh terhadap adanya kegiatan penyusunan RPJMDes ini karena berpola pada stigma itu adalah wewenang pemerintah desa bukan masyarakat. Hal ini juga yang mempengaruhi pembangunan jalan di desa Kuripan belum maksimal meski sudah ada pembangunan jalan yang ada. Hal ini menimbulkan jalan yang sedang diperbaiki rusak kembali karena kurangnya kesadaran warga terhadap adanya pembangunan dari pemerintah desa Kuripan.

Selain itu dengan kondisi geografis desa Kuripan yang merupakan Tepian Sungai Barito. Desa Kuripan berada di daerah pesisir sungai, yang berarti terdapat keberadaan air sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam pembangunan jalan. Tingginya curah hujan dan ketinggian air sungai dapat

mempengaruhi kemampuan jalan untuk dilalui oleh kendaraan. Banjir yang terjadi di sepanjang sungai juga dapat menyebabkan kerusakan pada jalan, terutama jika tidak ada sistem drainase yang memadai, selain itu ada alasan geografis lainnya sebagai berikut ;

a. Tanah berlumpur dan berawa-rawa.

Wilayah pesisir sungai dikenal memiliki ciri khas tanah yang berlumpur dan berawa-rawa. Sifat tanah ini cenderung kurang stabil dan menimbulkan tantangan dalam pembangunan infrastruktur, khususnya jalan. Karakteristik tanah yang lunak dapat menjadi hambatan utama karena memberikan tingkat kestabilan yang rendah untuk struktur jalan.

Tantangan utama yang dihadapi dalam pembangunan jalan di wilayah ini terletak pada sifat tanah yang tidak stabil. Jalan yang dibangun di atas tanah berawa-rawa rentan terhadap perubahan kondisi tanah, seperti pemadatan atau pelembutan. Oleh karena itu, proses pembangunan memerlukan teknik konstruksi khusus untuk memastikan bahwa jalan dapat bertahan dan berkinerja optimal meskipun di atas tanah yang lunak.

Pembangunan jalan di wilayah pesisir sungai membutuhkan penerapan teknik konstruksi khusus untuk mengatasi sifat tanah yang berlumpur dan berawa-rawa. Pemadatan tanah menjadi langkah kritis untuk meningkatkan kepadatan dan kestabilan tanah di bawah jalan. Selain itu, penggunaan material konstruksi khusus yang tahan terhadap kelembapan dapat menjadi solusi efektif untuk memastikan ketahanan jalan terhadap kondisi lingkungan yang cenderung lembab.

Pemilihan material konstruksi yang tepat menjadi elemen kunci dalam menanggulangi tantangan pembangunan jalan di wilayah pesisir sungai. Material

yang tahan terhadap kelembapan, seperti jenis aspal atau beton khusus, dapat meningkatkan daya tahan jalan terhadap faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi struktur jalan.

Dalam menyimpulkan, pembangunan jalan di wilayah pesisir sungai memerlukan pendekatan konstruksi yang khusus dan disesuaikan dengan karakteristik tanahnya. Proses pemadatan tanah, pemilihan material yang sesuai, dan desain jalan yang tepat menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan sifat tanah yang kurang stabil. Dengan mengintegrasikan teknik konstruksi yang cermat, dapat dihasilkan jalan yang kokoh dan tahan lama di wilayah berawa-

b. Kontur lahan yang tidak rata.

Pesisir sungai seringkali memiliki karakteristik kontur lahan yang tidak rata. Adanya elevasi yang bervariasi di sepanjang wilayah ini menciptakan tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan jalan. Desa Kuripan, sebagai contoh, mungkin dihadapkan pada topografi yang melibatkan tanjakan atau turunan yang signifikan di sepanjang jalur jalan yang direncanakan.

Tantangan utama dalam pembangunan jalan di daerah dengan kontur tidak rata adalah menciptakan jalur yang dapat diakses dengan aman oleh pengguna. Tanjakan dan turunan yang signifikan memerlukan perencanaan yang cermat untuk memastikan keamanan dan kenyamanan perjalanan. Oleh karena itu, pembangunan jalan di Desa Kuripan harus mempertimbangkan dengan serius aspek topografi yang tidak merata ini.

Perencanaan jalan yang mempertimbangkan topografi yang tidak merata melibatkan evaluasi mendalam terhadap elevasi, kemiringan tanah, dan struktur tanah di sepanjang jalur jalan. Pemetaan yang akurat dan analisis geoteknik diperlukan untuk mengidentifikasi titik-titik rawan, seperti tanjakan curam atau tikungan tajam, yang memerlukan perhatian khusus selama konstruksi.

Pembangunan jalan di Desa Kuripan harus melibatkan teknik konstruksi yang sesuai dengan karakteristik topografi yang tidak merata. Ini dapat mencakup pembuatan bentuk jalan yang sesuai dengan kemiringan alam, penggunaan teknik pemadatan tanah, atau bahkan pembangunan struktur pendukung seperti tanggul atau dinding penahan tanah untuk menanggulangi perubahan elevasi yang drastis.

Dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan jalan di Desa Kuripan, keamanan dan aksesibilitas harus menjadi prioritas utama. Langkah-langkah pencegahan dan mitigasi risiko, seperti pemasangan rambu lalu lintas yang sesuai dan pengaturan kecepatan, juga perlu dipertimbangkan. Dengan pendekatan yang hati-hati terhadap topografi yang tidak merata, pembangunan jalan dapat dilakukan dengan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat.

Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di desa Kuripan berjalan dengan baik meskipun belum maksimal dalam pembangunan jalan di Desa Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, pada tahun 2021-2022. implikasi RJPMDes sebagai instrumen penting memiliki dampak positif dalam pembangunan jalan di Desa Kuripan, Kabupaten Barito Kuala. RPJMDes membantu pemerintah desa dalam mengarahkan, merencanakan, mengalokasikan anggaran dengan tepat, serta

melibatkan masyarakat dan menciptakan keberlanjutan dalam pembangunan jalan desa.

Pembangunan jalan di desa Kuripan berjalan dengan baik namun belum maksimal. Fakta lapangan menyebutkan bahwa jalan yang dilakukan belum ada perbaikan namun dari pihak pemeritahan sendiri sudah melaksanakan pembangunan jalan utama desa dengan adanya pembangunan meski belum secara maksimal terlaksana, keadaan geografis desa yang harus memiliki perencanaan matang dalam pembangunannya, dan partisipasi masyarakat yang kurang peduli terhadap pembangunan jalan. Solusinya yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan berbagai pihak terkait dengan pembangunan jalan desa kuripan.

Pemerintahan Desa Kuripan menjalankan proyek pembangunan jalan desa dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk dinas terkait dan lembaga swadaya masyarakat. Kolaborasi ini bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dan pengetahuan yang diperlukan dalam merencanakan, mengawasi, dan mengimplementasikan pembangunan jalan desa. Pendekatan ini memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya, menciptakan lingkungan kerja sama yang produktif.

Pentingnya peran masyarakat dalam pelaksanaan proyek ini diakui, sehingga Pemerintahan Desa Kuripan memastikan bahwa penerapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) bersifat terbuka dan melibatkan partisipasi aktif warga. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, diharapkan proyek pembangunan jalan desa dapat lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan lokal.

Melalui penggunaan RPJMDes sebagai panduan, Pemerintahan Desa Kuripan menetapkan standar transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan desa. Dalam konteks ini, transparansi mengacu pada keterbukaan informasi terkait proyek kepada masyarakat, akuntabilitas menekankan tanggung jawab dan pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap hasil proyek, sedangkan keberlanjutan mengacu pada upaya pemeliharaan dan perawatan jalan desa untuk memastikan infrastruktur yang dibangun tetap berkelanjutan dan andal.

Pemerintahan Desa Kuripan menekankan komitmennya untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat melalui proyek pembangunan jalan desa. Selain sebagai sarana transportasi, proyek ini juga diarahkan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi lokal dengan memperbaiki konektivitas antarwilayah. Pemerintah desa juga berupaya merangsang partisipasi aktif warga dalam seluruh proses pembangunan, mengintegrasikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam setiap tahapan proyek.

Dengan mengadopsi RPJMDes, Desa Kuripan mengejar tujuan pembangunan jalan desa yang lebih maksimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakatnya. Dengan adanya jalan yang memadai dan layak, masyarakat di desa Kuripan pastinya lebih terbantu karena akses jalan lebih mudah.

Akses jalan yang lebih mudah memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat dan perkembangan wilayah tertentu. Beberapa dampak positifnya melibatkan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai arti akses jalan lebih mudah dan dampaknya sebagai berikut ;

a. Konektivitas dan mobilitas

Penyambungan wilayah melalui akses jalan yang lebih mudah merupakan langkah kunci dalam membentuk jaringan transportasi yang efisien. Dengan infrastruktur jalan yang memadai, wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi atau sulit dijangkau dapat terhubung secara lebih efektif. Ini menciptakan fondasi bagi terciptanya suatu sistem transportasi yang optimal, dengan dampak signifikan terhadap konektivitas dan pertukaran antar wilayah.

Efek Terhadap Pertukaran dan Layanan Akses jalan yang lebih baik membuka pintu luas untuk pertukaran barang, layanan, dan informasi antar wilayah. Pelaku usaha dapat dengan lebih lancar mengirimkan produk-produk mereka, mempercepat distribusi barang, dan mengurangi biaya logistik. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan mempermudah arus barang dan jasa.

Mobilitas Masyarakat dan Kualitas Hidup Masyarakat yang dapat lebih mudah bergerak dari satu tempat ke tempat lain, baik untuk keperluan pekerjaan, pendidikan, atau aktivitas sosial, merasakan dampak positif pada mobilitas dan kualitas hidup mereka. Aksesibilitas yang meningkat membuka peluang bagi individu untuk mengakses fasilitas dan layanan penting, meningkatkan kemungkinan pencarian pekerjaan yang lebih baik, serta memperluas kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial dan kebudayaan.

Dampak Ekonomi Secara ekonomi, penyambungan wilayah melalui akses jalan yang lebih mudah dapat merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Peningkatan konektivitas dapat memikat investor untuk berinvestasi di wilayah-wilayah yang sebelumnya kurang terjangkau. Akses yang lebih baik dapat

memberikan dorongan signifikan untuk pengembangan proyek-proyek ekonomi lokal dan memperluas peluang usaha.

Peningkatan Kesempatan dan Daya Saing Dengan meningkatnya aksesibilitas, masyarakat tidak hanya mendapatkan keuntungan pada tingkat individu, tetapi juga pada tingkat komunitas dan wilayah. Peningkatan akses jalan menciptakan kesempatan ekonomi baru, memperkuat daya saing wilayah, dan merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inisiatif ini, selain memajukan perekonomian, juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk merasakan perbaikan nyata dalam kualitas hidup mereka.

b. Ekonomi

Jalan yang baik memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Infrastruktur jalan yang memadai menciptakan landasan bagi efisiensi transportasi, yang selanjutnya memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari serangkaian efek positif yang dihasilkan oleh aksesibilitas dan konektivitas yang diperoleh melalui jalan yang baik.

Jalan yang baik secara langsung mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi transportasi barang. Peningkatan mobilitas barang membuka pintu lebar bagi aktivitas perdagangan dan investasi di wilayah tersebut. Kemudahan dalam memindahkan barang dari produsen ke konsumen berkontribusi pada dinamika ekonomi lokal, menciptakan lingkungan yang mendukung kegiatan bisnis dan pengembangan ekonomi.

Pelaku usaha dan petani mendapatkan manfaat yang substansial dari jalan yang baik. Dengan adanya infrastruktur jalan yang optimal, mereka dapat

mengirimkan produk-produk mereka ke pasar dengan lebih efektif. Hal ini menghasilkan peningkatan aksesibilitas terhadap pasar-pasar regional dan nasional, membuka peluang pemasaran yang lebih luas, dan pada gilirannya, meningkatkan potensi keuntungan ekonomi mereka.

Aksesibilitas yang ditingkatkan melalui jalan yang baik tidak hanya mempermudah pemasaran produk-produk lokal tetapi juga membuat wilayah tersebut lebih menarik bagi investasi. Kemampuan untuk dengan cepat dan efisien mengirimkan barang ke pasar dapat memikat investor untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan bisnis dan menciptakan siklus positif pertumbuhan ekonomi.

Secara keseluruhan, jalan yang baik bukan hanya merupakan jalur fisik untuk pergerakan barang, tetapi juga merupakan fondasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memastikan infrastruktur jalan yang optimal, suatu wilayah dapat mengoptimalkan potensinya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, meningkatkan daya saing, dan menciptakan kondisi yang mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

c. Pemberdayaan masyarakat

Akses jalan yang lebih mudah memainkan peran krusial dalam mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Infrastruktur jalan yang baik menjadi fondasi untuk menjembatani jarak antara masyarakat dan fasilitas-fasilitas vital seperti rumah sakit dan sekolah. Sehingga, pergerakan masyarakat menuju layanan kesehatan dan pendidikan dapat dilakukan lebih lancar, memberikan dampak positif pada pelayanan masyarakat.

Rumah sakit, sekolah, dan fasilitas pelayanan masyarakat menjadi lebih terjangkau dengan adanya akses jalan yang baik. Dengan perjalanan yang lebih cepat dan mudah, masyarakat dapat mengakses layanan-layanan tersebut tanpa hambatan yang signifikan. Ini bukan hanya meningkatkan ketersediaan layanan tetapi juga memperpendek waktu yang diperlukan untuk mencapai fasilitas-fasilitas penting tersebut.

Akses jalan yang baik bukan hanya memudahkan akses ke layanan rutin, tetapi juga berperan penting dalam peningkatan respons terhadap keadaan darurat. Dalam situasi-situasi kritis, pergerakan cepat petugas kesehatan, pemadam kebakaran, dan pihak berwenang dapat difasilitasi melalui jalan yang mudah diakses. Ini dapat meminimalkan kerugian dan menyelamatkan nyawa dalam keadaan darurat. Akses jalan yang lebih baik tidak hanya berkontribusi pada pelayanan dan tanggap darurat, tetapi juga membuka peluang bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan wilayah. Dengan kemudahan akses, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam dialog dan keputusan terkait perkembangan wilayah mereka, menciptakan lingkungan partisipatif yang memperkuat hubungan antara pemerintah dan komunitas.

Pemukiman yang lebih terjangkau, didukung oleh akses jalan yang mudah, dapat merangsang pertumbuhan ekonomi lokal dan memberikan kontribusi pada pemberdayaan komunitas. Aksesibilitas yang lebih baik juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan, taman, dan tempat rekreasi, yang semuanya berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, akses jalan yang

mudah menjadi elemen integral dalam membangun masyarakat yang berdaya dan berkualitas.

Dengan demikian, akses jalan yang lebih mudah tidak hanya meningkatkan konektivitas fisik suatu wilayah tetapi juga memiliki dampak yang meluas pada perkembangan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Harapan warga dan pemerintah desa pembangunan jalan desa di Desa Kuripan dapat berjalan secara berkelanjutan. Dengan adanya RPJMDes yang memberikan arah dan panduan untuk pembangunan jangka menengah, yang berarti pembangunan jalan tidak hanya terfokus pada tahun tertentu, tetapi direncanakan untuk periode yang lebih panjang. Hal ini memastikan bahwa pembangunan jalan dilakukan secara berkelanjutan dan dapat diawasi serta dievaluasi secara terus-menerus.

Dengan demikian, pembangunan jalan di desa Kuripan berjalan dengan baik meskipun belum maksimal.

2. Kendala Penerapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RjpmDes) Terhadap Pembangunan Jalan Di Desa Kuripan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021-2022

Kendala dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan jangka menengah desa adalah kurangnya kapasitas dan pengetahuan terkait Rancangan Anggaran Jangka Menengah Desa. Beberapa desa mungkin tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam merencanakan dan mengelola pembangunan jangka menengah secara efektif. Ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang perencanaan pembangunan, manajemen keuangan desa, dan peraturan-peraturan yang terkait.

Kurangnya kapasitas dan pengetahuan ini dapat menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan pembangunan desa yang efektif. Desa-desanya dengan latar belakang yang berbeda-beda, termasuk latar belakang pendidikan, pengalaman, dan keterampilan, mungkin menghadapi tantangan dalam merencanakan dan mengelola pembangunan jangka menengah yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat desa.

Tanpa pemahaman yang memadai tentang perencanaan pembangunan, manajemen keuangan desa, dan peraturan terkait, desa mungkin mengalami kesulitan dalam menyusun rencana anggaran yang realistis, melakukan pemantauan dan evaluasi yang efektif, serta menjalankan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Untuk mengatasi hambatan ini, penting bagi desa untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan mereka terkait Rancangan Anggaran Jangka Menengah Desa. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, workshop, dan pendampingan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, lembaga pembangunan, atau organisasi masyarakat sipil. Peningkatan kapasitas dapat meliputi pemahaman tentang proses perencanaan pembangunan, manajemen keuangan desa, penggunaan APBDes, serta pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan kebijakan terkait.

Selain itu, berbagi pengalaman dan pengetahuan antar-desa dan memanfaatkan sumber daya eksternal seperti ahli atau konsultan juga dapat membantu desa dalam meningkatkan kapasitas mereka dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan jangka menengah secara efektif.

Dengan peningkatan kapasitas dan pengetahuan, desa akan lebih siap dan mampu untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan jangka menengah

dengan baik, sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pada pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa Kuripan, pembangunan jalan menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Selain beberapa hambatan sebelumnya, keadaan geografis desa kuripan sangat mempengaruhi proses terlaksananya pembangunan jalan.

Desa Kuripan berada di daerah tepian sungai Barito, yang berarti terdapat keberadaan air sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam pembangunan jalan. Tingginya curah hujan dan ketinggian air sungai dapat mempengaruhi kemampuan jalan untuk dilalui oleh kendaraan. Banjir yang terjadi di sepanjang sungai juga dapat menyebabkan kerusakan pada jalan, terutama jika tidak ada sistem drainase yang memadai.

Wilayah tepian sungai cenderung memiliki tanah yang berlumpur dan berawa-rawa. Tanah tersebut kurang stabil dan dapat menyulitkan pembangunan jalan yang kokoh dan tahan lama. Proses pembangunan jalan di daerah ini mungkin membutuhkan teknik konstruksi khusus seperti pemadatan tanah atau penggunaan material khusus agar jalan dapat berdiri di atas tanah yang lunak.

Tepian sungai umumnya memiliki kontur lahan yang tidak rata. Desa Kuripan mungkin memiliki tanjakan atau turunan yang signifikan di sepanjang jalur jalan yang akan dibangun. Pembangunan jalan di daerah dengan kontur yang tidak rata memerlukan perencanaan yang cermat dan konstruksi yang sesuai agar jalan dapat diakses dengan aman oleh pengguna.

Sungai Barito dapat mengalami erosi dan abrasi, terutama saat debit air meningkat. Erosi dan abrasi sungai dapat menyebabkan tebing sungai atau bagian

jalan yang berada di dekat sungai terkikis atau bahkan ambruk. Oleh karena itu, dalam pembangunan jalan di desa Kuripan, harus diperhatikan mitigasi erosi dan abrasi dengan membangun struktur penahan atau perlindungan tambahan di sepanjang tepi sungai.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Jika masyarakat tidak aktif terlibat dalam penyusunan APBDes dan RPJMDes, maka program pembangunan yang direncanakan mungkin tidak memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Partisipasi masyarakat yang rendah dapat mengurangi tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan desa.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa memiliki dampak negatif terhadap kesuksesan program pembangunan dan pencapaian tujuan pembangunan desa. Jika masyarakat tidak aktif terlibat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), maka program-program pembangunan yang direncanakan mungkin tidak memenuhi kebutuhan dan harapan mereka.

Partisipasi masyarakat yang rendah dapat mengakibatkan ketidakcocokan antara program pembangunan yang direncanakan dan kebutuhan riil serta aspirasi masyarakat desa. Tanpa melibatkan masyarakat secara aktif, risiko terjadinya kesenjangan antara program-program pembangunan dan kebutuhan masyarakat desa dapat meningkat. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya dukungan, minat, dan motivasi dari masyarakat dalam menjalankan dan mendukung program-program pembangunan yang telah ditetapkan.

Rendahnya partisipasi masyarakat juga dapat mengurangi tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan desa. Ketika masyarakat tidak merasa memiliki kepemilikan dan tanggung jawab terhadap program-program pembangunan, mereka mungkin kurang termotivasi untuk berkontribusi dan bekerja sama dalam pelaksanaan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat yang aktif dan terlibat dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan lokal, mengidentifikasi masalah yang harus diatasi, serta memberikan ide dan saran yang dapat meningkatkan efektivitas dan relevansi program pembangunan.

Untuk mengatasi rendahnya partisipasi masyarakat, penting bagi pemerintah desa untuk membangun mekanisme partisipasi yang inklusif dan terbuka. Ini dapat melibatkan penyelenggaraan pertemuan publik, konsultasi, dialog, dan mekanisme partisipatif lainnya yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa. Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman dan informasi yang jelas tentang pentingnya peran mereka dalam merumuskan program pembangunan desa serta manfaat yang akan diperoleh dari partisipasi aktif mereka.

Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, program-program pembangunan dapat menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan dan dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat desa.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan upaya yang melibatkan peran aktif pemerintah desa, masyarakat desa, dan pihak terkait

lainnya. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa, memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat, serta membangun sinergi dengan lembaga dan instansi terkait adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa.